

## BAB II

### HEGEMONI AS DAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TIMUR

#### A. HEGEMONI AS DI ASIA TIMUR

Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan sistim perpolitikan dunia, dari sistem internasional yang didominasi dua negara superpower menjadi didominasi oleh satu kekuatan saja. Perubahan sistem ini telah mengakibatkan perubahan pola interaksi antar negara. Hal tersebut membawa negara-negara, terutama major powers merubah kebijakan luar negerinya. Perubahan sistim juga memberikan konsekuensi bagi tatanan dan stabilitas di dunia.

Hal yang penting dari politik internasional kontemporer adalah lanjutan dari tidak proporsionalnya posisi dimana Amerika Serikat menganggap bahwa stabilitas di Asia Timur merupakan hal yang vital dan mereka mengadopsi strategi hegemoni untuk mempromosikan regional order guna melayani kepentingan Amerika. Pengaruh AS yang paling dominan dalam sistem internasional yang baru . AS tidak menemukan lagi saingan yang berarti dan menjelma sebagai kekuatan politik yang besar. Dengan kekuatan militer dan perekonomiannya, maka ideology liberalis-kapitalismenya banyak diterima sebagian besar negara-negara di dunia.<sup>1</sup>

Tidak ada negara yang dapat dalam mengimbangi AS sehingga mengakibatkan pasca Perang Dingin menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi wilayah didunia termasuk di Asia Timur. Dalam merespon tantangan yang dihadirkan oleh kekuatan dominan, AS telah mengejar strategi hegemoni untuk mempertahankan pengaruhnya. Strategi Hegemoni disini berarti mempengaruhi negara-negara di wilayah untuk tatanan internasional berdasarkan nilai dan interesnya. Kedua setelah kejadian 11 September telah berdampak pada kebijakan luar negerinya. Serangan teroris telah merubah persepsi

---

<sup>1</sup> Ikenberry, G.J. (ed.) *America Unrivaled: The Future of the Balance of Power*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.

ancaman bagi AS, bahwa ancaman kepada kepentingan AS, bisa langsung mengenai pertahanan dalam negerinya, oleh karena itu, peran keamanan AS perlu ditingkatkan. Untuk di Asia Timur, hegemoni AS masih dibutuhkan untuk fungsi stabilitas di kawasan.

Pada pertengahan 1990, AS sangat mengejar hegemoninya di Asia Timur. Hal tersebut terlihat dari kekuatan garansi bagi stabilitas di regional, Setelah perang dingin, mereka tetap berperan bagi regional, sebagai kekuatan penyeimbang dan berperan dalam “offshore balancer”.<sup>2</sup> AS juga berperan sebagai pembentukan institusi keamanan multilateral. Mereka dapat mengorganisasikan negara-negara yang memfokuskan pada pembendungan China.<sup>3</sup>

Ada dua hal yang menjadikan AS sebagai kekuatan hegemoni, pertama AS telah melakukan hubungan bilateral dengan negara kunci di Asia Timur seperti Korea Selatan, yang merefleksikan kelanjutan hubungan kedua belah selama Perang Dingin. Hal serupa juga dilakukan dengan Jepang dan Taiwan. Dalam hubungannya dengan China, AS telah melakukan pengikatan (*engagement*) daripada pembendungan (*containment*). Hubungan juga dilakukan terhadap India dan Australia. AS juga telah terlibat dalam *multilateral security initiative* di wilayah seperti di ARF dan Northeast Asean Dialogue, akan tetapi dalam konteks sebagai pelengkap langkah bilateral.<sup>4</sup>

Hal lain dari institutionalisasi hegemoni AS adalah kehadiran militer AS. Menurut Joseph Nye dalam US Department of Defense tahun 2001 menyebutkan bahwa keberadaan dan komitmen militer AS di Asia Timur tidaklah terbatas waktunya. Komitmen tersebut meliputi keberadaan Angkatan Bersenjata AS dan memelihara kehadiran AL. Di Asia Timur, Kehadiran AL AS diperkuat dengan aliansi dengan Korea Selatan dan Jepang. Di Asia Tenggara, dilakukan perjanjian dan kerjasama kelautan dengan Indonesia, Singapura, Malaysia dan Philipina.

---

<sup>2</sup>C Layne, C . “*The Unipolar illusion : why new great powers will rise*, International Security 17, 1993, hal 5-51.

<sup>3</sup> Op cit.

<sup>4</sup> RA Cossa, ‘Everything is going to move everywhere, but not just yet’, *Comparative Connections: An E-Journal on East Asian Bilateral Relations*, 2003, hal 5.

Menurut AS strategi hegemoninya telah berperan bagi terciptanya tatanan regional serta membantu peredaan pengembangan *major power* dari rivalitas satu sama lain seperti Jepang dan China terutama dalam hal sejarah kelam kedua belah pihak dan kecurigaan. Sentimen negative kedua belah pihak tidak menyebabkan terjadinya eskalasi lebih lanjut, hanya terjadi di permukaan saja.<sup>5</sup>

AS juga dapat mengatur konflik regional yang dapat mengakibatkan terjadinya perang baik dalam skala lokal ataupun yang lebih luas. AS telah melakukan inisiatif sekitar tahun 1990-an untuk menjaga kestabilan melalui diplomasi dan melakukan ancaman melalui kekuatan militer. Hal tersebut dapat dilihat dalam krisis di selat antara China dan Taiwan, krisis nuklir Korut 1994, krisis India-Pakistan di Kashmir 1998 dan 2001.

Dampak utama bagi AS dalam kebijakan luar negerinya. Pertama, adalah serangan teroris mengakibatkan AS meninjau kembali persepsi tentang ancaman dan keamanan nasional AS. Pasca tumbangnya Uni Soviet sedang mencari ancaman terbesar berikutnya. Pasca Perang Dingin Jepang sebagai atensi berikutnya untuk alasan ekonomi dan militer. Kebangkitan China, dengan potensi menyaingi AS, menjadi hal yang menarik pada tahun 1990-an.

Serangan 11 September membalikan Kebijakan Luar Negeri pada hal yang berbeda. Satu tahun setelah penyerangan, para pembuat kebijakan di AS menyatakan tantangan terbesar keamanan nasional AS adalah terorisme global, *rogue states*, dan senjata pemusnah masal (WMD). Persepsi ancaman tersebut dinyatakan oleh Pemerintahan Bush dalam Strategi Keamanan Nasional pada September 2002. ancaman telah dikaitkan dengan pertahanan dalam negeri sebagai tujuan dari keamanan nasional. Proteksi terhadap keamanan dalam negeri merupakan kepentingan yang vital.

Pasca serangan 11 September, kebijakan luar negeri AS cenderung kurang memperhatikan institusi internasional, menjauhkan dari multilateralisme menuju unilateralisme. AS kurang nyaman dengan institusi internasional dibandingkan dengan

---

<sup>5</sup> TJ Christensen, T.J. 'China, the U.S.-Japan alliance, and the security dilemma in East Asia', *International Security*, 23, 1999, 49–80.

politik luar negeri sepanjang 1990-an. Hal tersebut terlihat ketika AS selalu menggunakan PBB dalam perang Teluk, Somalia, Bosnia dan NATO dalam masalah Kosovo. Namun setelah 11 September 2001, AS menyerang Afganistan dan Irak meskipun tidak mendapat dukungan PBB dan sebagian anggota NATO.

## B. PERSEPSI ANCAMAN CHINA

Dampak dari Strategi Hegemoni AS di Asia Timur ? bila pada tahun 1990-an strategi AS di Asia Timur meliputi : forward defense, aliansi bilateral dan partnership, dan peran AS sebagai stabilitator di Asia Timur, maka dibawah Bush meyakini major power di Asia Timur disatukan dengan perang melawan terorisme. Namun pada akhirnya, pasca 11 September politik luar negeri AS lebih rumit daripada strategi hegemoni pada 1990-an. Menurut Joseph Nye strategi AS di Asia Timur tidak jauh berberda dengan 1990-an dimana ikatan yang kuat dengan negara-negara teman di kawasan guna penyebaran AL dan AU-nya. AS masih merupakan kekuatan dominan bagi stabilitas di kawasan. Setidaknya, pasca September 11 telah memberikan makna tersendiri bagi hegemoni AS dibandingkan dengan tahun 1990-an.

Dalam *US National Security Council, 2002*, disebutkan bahwa AS mendukung penguatan kerjasama dengan *major power* lainnya. Memproklamirkan melawan kekerasan dan *chaos* yang disebabkan oleh terorisme. Membangun nilai bersama diantara global power dan tantangan bersama.

Kebangkitan China dipersepsikan sebagai ketidakpastian dan kecurigaan oleh AS. Keberhasilan pembangunan ekonomi, modernisasi dan peningkatan kemampuan militer, serta adanya kebutuhan akan sumber energi menjadikan China sebagai salah satu ancaman Barat. Para politisi, pemerintahan dan akademisi berusaha untuk membendung dan menolak anggapan China sebagai “peaceful Rise”<sup>6</sup> Kebangkitan China merupakan ancaman bagi keamanan nasional AS, oleh karena itu AS harus merespon untuk menghindari ancaman masa depan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Charles Krauthammer, *Why we must contain China*, Time, July 31, 1995 hal 72.

<sup>7</sup> Bill Gertz, *The China Threat : How The People's Republic Targets America*, Washington DC, Regnery, hal.199

Pemerintah AS sendiri juga memperhatikan perkembangan China dan memberikan perhatian terhadap kemajuan China dalam bidang ekonomi dan militernya. Dalam laporan Quadrennial Defence Review Report melaporkan bahwa China mempunyai potensi untuk menjadi competitor militer AS dengan modernisasi dan peningkatan kapabilitasnya<sup>8</sup>

Pemerintahan AS melihat China sebagai *strategic competitor*. Condoleezza Rice menyatakan meski terdapat argumen kerjasama ekonomi dengan China, China masih merupakan ancaman potensial bagi stabilitas di wilayah Asia Timur. Menurut Rice, kekuatan militer China tidaklah sehebat AS, tetapi kondisi tersebut tidaklah permanen. China adalah kekuatan besar dengan kepentingannya terutama dalam masalah Taiwan dan Laut China Selatan. China juga terganggu dengan kehadiran AS di Asia Pasifik. Hal ini bukan berarti sebagai kekuatan “status quo” tetapi ingin bertindak sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan. Posisi tersebut menyebabkan China sebagai strategic competitor, bukan sebagai strategic partner seperti yang dilakukan pada pemerintahan Clinton sebelumnya. Selain itu China, bekerja erat dengan Iran, Pakistan dalam hal teknologi rudal balistik.<sup>9</sup>

Adanya ancaman China tidak hanya dirasakan dikalangan pemerintah saja, menurut hasil survei Harris Poll menunjukkan, mayoritas responden di Eropa mempersepsikan China sebagai “ancaman terbesar” bagi stabilitas global. Di Amerika Serikat, 31 persen responden memandang China sebagai ancaman terbesar dunia, 54 % percaya bahwa kehadiran China akan mendominasi dunia.<sup>10</sup> melebihi Iran dan Korea Utara yang sempat “dicap” Presiden Bush sebagai bagian Axis of Evil. Bahkan, Amnesty Internasional mengumumkan, situasi HAM di China makin memburuk dalam tahun-tahun terakhir.

---

<sup>8</sup> Departemen Pertahanan AS, Quadrennial Defence Review Report. (Washington DC, 2006) hal 41.

<sup>9</sup> Condoleezza Rice, *Campaign 2000 : Promoting the National Interest*, Foreign Affairs, vol 75 No.1 th 2001 hal.56

<sup>10</sup> Survey pendapat publik tentang ancaman China, diselenggarakan Woodrow Wilson Center for Scholars dan Canada Institute on North American Issues (Washington DC,) Juni 2005 hal 1

Beberapa alasan mendasari persepsi tentang "ancaman China". Pertama, sistem politik China yang tak demokratis menyulitkan kontrol rakyat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuatan militer. Kedua, China dituduh menggunakan kapasitas militer untuk membungkam gerakan demokrasi dan HAM di dalam negeri. Ketiga, China dituduh membantu diam-diam negara-negara "pelanggar HAM", seperti Myanmar dan Sudan, untuk kepentingan akses energi dan sumber alam. Keempat, bantuan ekonomi tak bersyarat China untuk negara-negara berkembang, yang didasari prinsip non-intervention, dinilai telah "memotong" kampanye internasional untuk penegakan demokrasi dan good governance.

### C. KERJASAMA PERTAHANAN AS DENGAN NEGARA ASIA TIMUR

#### 1. Potensi ancaman dan konflik di Asia Timur

Dalam laporan ke Kongres AS pada September 2006, sebuah hearing dengan judul "Amerika dan Asia di dalam dunia yang berubah", menyebutkan bahwa kebijakan AS di Asia Pasifik dengan tujuan melaporkan strategi terkini dan dimasa datang di wilayah. Laporan ini memfokuskan Strategi AS dan kerjasama pertahanan di wilayah Asia Pasifik. Mantan Chairman Jim Leach dari Seksi Asia dan Pasifik mengamati bahwa di wilayah Asia Pasifik ini, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan geopolitik yang besar beberapa tahun ke depan. Jim Leach juga mengatakan bahwa kehadiran militer di luar negeri merupakan elemen pokok kebijakan keamanan nasional AS di Asia Pasific. Kehadiran ini juga mempromosikan kestabilan di wilayah dan, Jaringan kerjasama dengan para sekutunya telah terjalin dengan baik sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu Amerika Serikat akan terus memelihara kerjasama bilateral aliansi pertahanan dengan beberapa negara Asia yang telah dimulai sejak tahun 1950, sebagai posisi untuk membendung ekspansi komunis di Asia selama periode PD II dan Perang Korea. Hubungan persekutuan ini menyediakan dukungan kepada AS selama Perang Dingin dan perang di Vietnam. Namun lingkungan persekutuan yang dibangun sudah berubah secara dramatis. Runtuhnya Uni Soviet, pasca Perang Dingin, krisis keuangan

Asia, kebangkitan China, serta timbulnya gerakan radikalisme keagamaan, mempertanyakan signifikan Asia sebagai bagian geopolitik AS. Perkembangan ini termasuk Kebangkitan China, kelanjutan potensi konflik antar negara, perjuangan melawan militansi Islam, dan anggaran persenjataan negara Asia Pasifik

Pertumbuhan ekonomi China dan tumbuhnya China sebagai kekuatan baru menjadi makna baru didalam geopolitik di Asia. Harapan Amerika Serikat dengan pengikatan dan pertumbuhan ekonominya akan menuntun China untuk menjadi lebih demokratis dan menjadi pihak yang berkepentingan di urusan ekonomi global dan masalah politik .

Amerika Serikat menginginkan pertumbuhan perekonomian China dapat membawa manfaat bagi perkembangan di kawasan, dalam konteks ini AS sudah mencari untuk memperkuat aliansi dan mengembangkan strategi baru dan kerjasama pertahanan dikawasan. Memposisikan kapabilitas militer diwilayah dengan setrukturisasi dan penyebaran kembali kekuatannya di wilayah. Sementara ketegangan terus-menerus di selat Taiwan, berasal dari tentangan China kepada kemerdekaan Taiwan, modernisasi militer China, proyeksi pertumbuhan power dan kemampuan , perkembangan hubungan diplomatiknya , pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mendorong kebutuhan akan energi yang besar dan sumber daya alam lainnya telah membangkitkan perhatian di AS. Pentagon's Quadrennial Defense Review 2006 dalam laporan tahunannya 2006 ke Kongres dalam hal kekuatan militer China menyebutkan bahwa China mempunyai potensi yang paling luar biasa untuk bersaing secara militer dengan Amerika Serikat.

Kebanyakan pandangan perluasan militer China terutama ditujukan untuk penyelesaian masalah Taiwan, meskipun ada pandangan bahwa kemampuan militer Chinanya tidak hanya ditujukan pada Taiwan . Para pengamat percaya bahwa China mencoba mencapai angkatan perang laut yang bisa menghalangi atau melambatkan intervensi angkatan perang AS dalam konflik di selat Taiwan. Beberapa pengamat memandang bahwa seperti keinginan pemimpin China untuk menjadikan China sebagai negara yang kuat di Asia Timur dan mencegah China dibawah naungan kekuasaan tunggal AS di wilayah

Selain itu, dinamika politik di Asia masih diliputi oleh potensi konflik antar negara seperti konflik di Semenanjung Korea, dan diantara India dan Pakistan, Potensi konflik juga terjadi antara India – China, Korea Selatan dan Jepang. antar negara ini menyebabkan Jepang – China masih terus mempunyai prospek yang sangat pada konflik antar negara yaitu meliputi konflik China dan Taiwan, di Semenanjung Korea, dan di antara India dan Pakistan. Potensi konflik antar negara ini menyebabkan merefleksikan penjualan persenjataan di kawasan. India, China, Taiwan, Korea Selatan, dan Pakistan adalah negara-negara diantara yang membeli teratas persenjataan dari tahun 1998 sampai 2005. Ketegangan juga ada di antara Jepang dan China, dan di antara Korea dan Jepang. Potensi konflik menyebabkan penjualan persenjataan di kawasan seperti India, China, Taiwan, Korea Selatan, Pakistan adalah negara-negara pembeli teratas persenjataan dari tahun 1998 s/d 2005.

Konflik potensial di Taiwan adalah skenario yang masuk akal bagi keterlibatan AS di Asia Timur. Presiden Chen Shuibian dari Partai Progresif Demokrat (DPP) sudah menyuarkan posisi merdeka, daripada posisi Partai Kuomintang (KMT). Pada 2001, Presiden Bush menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan segala cara untuk menolong Taiwan membela sendiri, namun demikian AS tetap memperingatkan Taiwan, bahwa AS tidak ingin melihat destabilisasi di kawasan dan pernyataan kemerdekaan Taiwan tersebut dapat membangkitkan konflik dengan China.

Ketegangan di Semenanjung Korea bertambah pada Juli dan Oktober 2006 sebagai hasil uji coba peluru dan tes nuklir Utara Korea. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Korea Utara ingin terus memperoleh kemampuan militer baru yang semakin berbahaya. Ketegangan terus-menerus di Semenanjung Korea menjadikan konflik di Asia Timur terus berkepanjangan.

Sementara sejarah perang India dan Pakistan dan ketegangan terus-menerus membuat konflik di masa depan akan terus berlanjut di anak benua. Kedua negara tersebut berjuang mencegah perang pada 1947, 1965, and 1971. Pada 1998, ketegangan diperbatasan terjadi akibat tes nuklir oleh baik India maupun Pakistan, bentrokan kedua

negara terjadi di perbatasan di Kargil, Kashmir pada 1999. Perang juga hampir terjadi pada 2001-2002 setelah pada 13 Desember, 2001, parlemen India diserang teroris oleh kelompok teroris Lashkar-E-Toiba dan Jaish-E-Muhammad, yang bermarkas di Pakistan. AS telah menempatkan kelompok-kelompok ini di atas daftar terorisnya sesudah serangan. Perbedaan Muslim Pakistan dan kelompok Hindu India terus berlanjut. Ketegangan muncul pada Juli 2006 sesudah rentetan ledakan kereta api di Bombay yang menewaskan 186 orang. Kepolisian Bombay mengklaim bahwa serangan direncanakan oleh Dinas Intelijen Pakistan (Pakistan's Inter Service Intelligence /ISI). Semua kejadian tersebut menetapkan bahwa adanya potensi hubungan antara terorisme dan konflik antar negara. Situasi diperbatasan Kargil, dapat berdampak pada adanya perang total diantara India Pakistan.

## 2. Penjualan Persenjataan di Asia Timur

Penjualan persenjataan di Asia Timur memperlihatkan AS masih mendominasi diikuti oleh China, Jepang, Korsel, Taiwan dan Korea Utara. China memfokuskan anggaran militernya untuk peningkatan C4ISR (komando, communications, komputer, intelijen, penjejakan, dan pengintaian) sistem. Sementara India, mengeluarkan anggaran \$19 milyar pada 2005. India termasuk salah satu negara Asia yang mempunyai anggaran pertahanan yang terus berkembang. Pada 2007 anggaran pertahanan India meningkat 44% . Pengeluaran ini berdasarkan laju sebanyak 8% dari pertumbuhan ekonomi dan mewakili 2,56% GDP, ditentang ke 2,33% di bawah sebelumnya lima tahun rencana. Kementerian Pertahanan India menghabiskan di laju 3% GDP. Sejak kemerdekaan, India sudah berjuang melawan perang melawan Pakistan dan China.

Meskipun meratanya persentase GDP yang dilewatkan untuk anggaran pertahanan cukup stabil baik di Asia Timur dan Australia, tetapi secara keseluruhan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun daerah Timur Tengah merupakan daerah pembeli yang paling besar di dunia, namun modernisasi program persenjataan terdapat di India dan China. Diantara tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 anggaran pertahanan di wilayah Asia turun naik di antara 1,45% dan 1,57% GDP. Amerika Serikat

mengeluarkan sekitar 4% dari GDP-nya untuk pertahanan. Anggaran pertahanan di wilayah Asia Timur dan Australia bertambah dari \$179,6 milyar pada 2003 hingga \$195,7 pada 2004. Anggaran Pertahanan masih tertinggi di Asia adalah AS dan sekutunya.

### 3. Strategi Keamanan AS di Asia Timur

Dalam skala yang luas, strategi keamanan Amerika Serikat, menurut Presiden Bush didasarkan pada dua hal yaitu pertama, mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemanusiaan serta mengakhiri tirani, dan promosi demokrasi. Hal ini merupakan tradisi politik luar negeri AS. Hal lain adalah melindungi keamanan dalam negeri serta membuat dunia lebih damai dan demokratis berdasarkan nilai-nilai universal serta peningkatan kemakmuran bersama.

Setelah mengamati bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan di seluruh Asia Timur maka Strategi Keamanan Nasional 2006 Amerika Serikat menunjuk kepada keperluan untuk mempertahankan aliansi dan melanjutkan kemitraan yang didukung dengan integrasi ekonomi dengan memperluas perdagangan dan mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi.

Quadrennial Defense Review (QDR) 2006 menyarankan keperluan untuk menentukan pilihan negara guna kepentingan strategis dalam upaya menangkal kemungkinan bahwa akan muncul kekuatan utama (major power) yang bisa menjadi potensi ancaman di masa mendatang. The QDR menyebutkan kekuasaan utama akan muncul, dan China mempunyai potensi yang paling besar untuk bersaing secara militer dengan Amerika Serikat. The QDR juga menyampaikan keprihatinan persenjataan dan kemampuan militer China. Oleh karena itu Amerika Serikat akan berusaha untuk menjamin bahwa tak ada kekuasaan asing yang bisa menentukan dan mendikte keamanan di kawasan dan keamanan global. Untuk itu perlunya strategi pemagaran dengan kemungkinan untuk bekerjasama dalam upaya menghindarkan konflik dimasa

depan. Disamping itu AS perlu memperbaiki kemampuan negara mitra dan mengurangi kelemahan mereka.

Salah satu bagian-bagian pokok yang dipusatkan adalah penguatan aliansi untuk mengalahkan terorisme global. Perang melawan terorisme juga merupakan perang pemikiran, untuk itu diperlukan demokrasi sebagai pemecah masalah dalam jangka panjang. Sementara dalam jangka pendek adalah mencegah serangan oleh jaringan-jaringan teroris, mencegah penggunaan senjata pemusnah massa oleh sekutu teroris, menyangkal tempat perlindungan teroris, dan menyangkal kontrol teroris pangkalan pelaksanaan yang mana pun. kemampuan Amerika Serikat dan sekutunya bekerja bersama untuk mempengaruhi lingkungan global pokok bagi penyerangan jaringan-jaringan teroris.

Tema strategis ini disoroti oleh Penasehat keamanan Nasional Steve Hadley ketika menguraikan garis besar “*three basic insights*” ke dalam strategi di Asia Timur pada April 2006. Titik pertama menyoroti pentingnya “sekutu tradisional, yaitu bangsa yang saling berbagi nilai demokrasi dan kebebasan. Sementara untuk mencegah potensi konflik Jepang Korea Memperkuat kerjasama dengan sekutu dan teman-teman AS pengembangan kerjasama dan kreatifitas untuk tantangan regional dan global, seperti perang atas terorisme. Wawasan ketiga memperhatikan China sebagai pihak yang berkepentingan yang bertanggung jawab dan bekerja sama untuk menemukan pemecahan masalah bersama. Perubahan kebijakan yang memperburuk ketegangan. Seperti perluasan militer mereka yang tidak transparan; pencarian mereka untuk eksploitasi energi dan dukungan mereka terhadap negara kaya sumber daya alam tetapi dengan catatan buruk dari demokrasi dan hak asasi manusia.

Amerika Serikat sudah melakukan sejumlah inisiatif pada level strategis untuk memperhatikan peningkatan keamanan regional. Termasuk diantaranya Inisiatif keamanan antara AS, Australia dan Jepang. Pembukaan kerjasama dengan India, mengembangkan kerjasama ASEAN and beberapa perubahan kebijakan pemerintah AS untui konfigurasi lebih baik bagi kerjasama di wilayah.

Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bertemu di Sydney pada 18 Maret, 2006 untuk menyelenggarakan Dialog Strategis Trilateral para menteri. Ketiga negara menyetujui menjaga stabilitas dan keamanan secara global dan dengan fokus khusus di daerah Asia Pasifik. Dalam Joint Statement tersebut akan ditingkatkan kerjasama keamanan diantara negara. Dialog juga membicarakan konsolidasi demokrasi dan memperkuat kerangka kerjasama di wilayah Asia-Pasifik. Mengikat China dalam ikatan dalam pembangunan di wilayah. Pertemuan juga memperhatikan keperluan untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN, Korea Selatan dan memperkuat kemitraan global dengan India. Dalam kaitan dengan Inisiatif Keamanan Trilateral ini Menlu AS Rice menyatakan kita semua di wilayah, terutama sekutu AS telah berusaha yang sudah berlangsung lama, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bersama untuk mencoba dan menghasilkan kondisi yang lebih baik dengan mengajak China menjadi kekuatan positif dalam politik internasional.

India dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama pada Maret 2006 itu mengikat kerjasama melawan ancaman bersama yang disebabkan oleh kurangnya toleransi, terorisme, serta penyebaran senjata pemusnah massal dan mengungkapkan harapan usaha mereka untuk memberikan pengaruh yang positif atas masa depan sistem internasional. India dan Amerika Serikat terus saling berbagi keprihatinan atas berkembangnya Islam militan. Pemerintah Bush juga mendukung India sebagai kekuatan utama di regional dan mengembangkan hubungan strategis dengan India sebagai usaha untuk berkembang untuk mengimbangi China.

#### 4. Postur Pasukan AS di Asia Pasific

Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dibagi menjadi dua komando militer, yaitu the US Pasific Command dan US Central Command dimana dua dari sembilan Comando Combatan dan dari lima Komando Wilayah. Asia Pacific berada dibawah Komando Pasific, bagian dari Selatan dan Asia Tengah adalah bagian dari Komando Central . Pacific Command

The United States Pacific Command (USPACOM) berpangkalan di Hawaii mempunyai area tanggung jawab (AoR) meliputi sekitar 50% permukaan bumi dan kira-kira 60% dari penduduknya, termasuk dua negara yang banyak penduduknya yaitu Indonesia . US PACOM membawahi 43 negara dengan lima negara sekutu. US PACOM meliputi area tanggung jawab dari Alaska ke Madagaskar dan dari India ke Pasifik Selatan. U.S. Pacific Command memasukkan U.S. Forces Japan, U.S. Forces Korea, Special Operations Command Pacific, dan Alaska Command.. Secara operasional, Panglima Pasifik melapor secara langsung kepada Menteri Perthanan dan Presiden.

#### Central Command

The US Central Command (CENTCOM) adalah Kesatuan Komando tempur dengan bidang tanggung jawab yang memasukkan Timur Tengah dan bagian-bagian Afrika Timur dimana kekuatan militer menyebar keseluruh wilayah. Konsentrasi terbesar terdapat di Jepang, Korea dan Afganistan. Demi untuk meningkatkan keluwesan angkatan perang AS di Asia dan peningkatan efektivitas gerakan pasukan, maka pasukan AS disembarkan sampai zona konflik, sebagian militer AS disembarkan di Jepang dan Korea Selatan serta diperluas di Guam, Alaska, Hawaii, dan Pantai Barat Amerika Serikat.

Mengenai keberadaan pasukan AS diluar negeri tersebut, terdapat kecenderungan yang positif dimana Kelihatannya ada trend yang positif dimana menurut jajak pendapat oleh Chicago Council of Global Affairs. Kira-kira 68% dari orang Amerika berpendapat bahwa militer AS yang berada di luar negeri dipertahankan (53%) atau lebih banyak lagi (15%). Kira-kira 65% orang Amerika percaya keberadaan militer AS itu di Asia Timur sebaiknya dipelihara sementara yang menentang 30% yang merasa sebaiknya dikurangi. Sementara untuk penduduk Korea Selatan 62 % penduduk Korea Selatan mendukung keberadaan pasukan AS di Korsel. Sementara yang menentang 29 % . Mengenai jumlah militer AS di Korea Selatan, 59% keberadaan militer AS di Asia Timur sebaiknya ditingkatkan dan lagi 15% penduduk Korsel setuju dikurangi. Di Jepang, 57%

mendukung keberadaan militer AS, sementara 34% yang menentang keberadaan militer AS di Jepang.

Dasar rasional bagi bagi pengiriman pasukan AS diluar negeri adalah sistem San Fransisco dimana dibentuk setelah AS memenangkan PD II dan membentuk Persekutuan bilateral Pasifik, Sistem dikembangkan tahun 1950 sewaktu Amerika Serikat berusaha membendung komunisme dengan aliansinya yaitu Jepang, Australia, Korea Selatan, Thailand dan Philipina.

#### Kerjasama Pertahanan AS dengan Jepang

Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara AS dengan Jepang ditandatangani di Washington, DC pada 19 Januari 1960. Perjanjian pengikatan Jepang kepada pihak Barat selama perang dingin. Perjanjian juga meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi. Perjanjian Keamanan sebelumnya ditandatangani tahun 1951 sebagai dasar bagi perjanjian keamanan Jepang-AS. Ditandatangani setelah Jepang mendapatkan kedaulatan penuh setelah perjanjian okupasi. Pembicaraan bilateral untuk merevisi pakta keamanan 1951, dimulai pada tahun 1959, dari the new Treaty of Mutual Cooperation and Security yang ditandatangani di Washington 19 Januari 1960.

Dibawah perjanjian, kedua pihak diwajibkan untuk memelihara dan mengembangkan kapasitas untuk menolak serangan musuh dan saling membantu apabila terjadi serangan diwilayah territorial Jepang. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa Jepang tidak dibolehkan membantu militer AS sebab dalam konstitusi melarang mengirimkan tentara keluar negeri (pasal 9). Hal tersebut menandakan bahwa konstitusi melarang mengembangkan kekuatan darat, laut dan udara.

Pada April 1996 dalam kesempatan kunjungan Presiden Clinton ke Jepang, telah dicapai kesepakatan antara kedua pemerintah AS dan Jepang (PM Hashimoto) yang dituangkan dalam suatu Deklarasi Bersama atau “US-Japan Joint Declaration on Security”, yang intinya adalah untuk meninjau kembali (review) atas garis-garis besar

(Guidelines) dari AS-Jepang *Security Agreement* tahun 1987, untuk disesuaikan lagi dengan tuntutan dan perubahan politik Pasca Perang Dingin. Kedua kepala pemerintahan sepakat bahwa "The US-Japan Security Relationship" tetap dipandang sebagai pijakan untuk mencapai dan terpeliharanya perdamaian dan kemakmuran di Asia Pasifik dalam memasuki abad ke-21. Disepakati pula bahwa meskipun perang dingin telah usai, potensi kearah in-stability dan un-certainty di Asia Pasifik masih besar, karenanya upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan ini sangat penting bagi keamanan Jepang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian dilakukan review atas Guidelines tahun 1978 oleh *US-JAPAN SECURITY CONSULTATIVE (SCC)*. Pada 23 September 1997 di New York oleh kedua Menlu AS dan Jepang telah diumumkan hasil-hasil review yang dilakukan, yang dituangkan dalam suatu "Joint Statement of US-Japan Security Consultative Committee, Completion of the Review of the Guidelines for US-Japan Defence Cooperation.

Berdasarkan Guidelines baru tersebut maka kerjasama keamanan AS-Jepang akan mencakup 3 aspek kerjasama yaitu :

- a. Kerjasama keamanan dalam situasi normal.
- b. Tindakan-tindakan yang harus diambil jika terjadi suatu serangan militer terhadap Jepang, dan
- c. Kerjasama keamanan dalam hal terjadi suatu perkembangan situasi disekitar Jepang yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas Jepang (Situations in areas surrounding Japan).

Meskipun Guidelines baru ini telah diperluas dari Guidelines tahun 1978, namun tetap dipegang dan dipertahankan beberapa prinsip dasar yang sudah ada yaitu :

- a. Bahwa hak-hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam US-Japan Security Treaty, tidak mengalami perubahan.

- b. Setiap tindakan Jepang harus tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi Jepang, dan kebijakan pertahanan Jepang yang berpegang teguh pada 3 prinsip non-nuklir Jepang.
- c. Setiap tindakan yang dilakukan Jepang dan AS harus konsisten dan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.
- d. The Guidelines dan program-program yang tercantum dalam guidelines ini oleh masing-masing pemerintah tidak perlu harus diikat melalui suatu perundang-undangan atau administrasi dan anggaran biaya yang khusus, namun akan dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.

Secara umum, kerjasama keamanan antara AS-Jepang tersebut antara lain sebagai berikut :

#### 1. *Cooperative Under Normal Circumstances*

Kedua negara akan berpegang teguh pada US-Japan Security Treaty yang telah ada, dimana masing-masing negara akan tetap berpegang pada postur pertahanan yang dirasakan sesuai dengan masing-masing pihak. Dalam rangka mempertahankan komitmennya, AS akan tetap mempertahankan kemampuan tangkal nuklirnya, penempatan pasukannya di Asia Pasifik dan saran-saran lain yang diperlukan untuk menunjang pasukan-pasukan diatas. Kedua negara akan melakukan kerjasama termasuk pertukaran informasi dan konsultasi politik.

#### 2. *Actions in Response to an Armed Attact Against Japan*

Dibedakan antara 2 hal yaitu pada saat terancam dan pada saat serangan terjadi. Pada situasi pertama, kedua pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan Jepang. Pada situasi kedua, kedua pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan bersama yang diperlukan untuk mematahkannya pada tingkat sedini mungkin. Dalam situasi diatas, Jepang jika diperlukan akan menyediakan tambahan-tambahan fasilitas sesuai dengan Treaty Keamanan yang

ada. Jika perlu, Angkatan Bersenjata AS dan Self Defence Force (SDF) Jepang akan menggunakan semua fasilitas yang tersedia yang dimiliki oleh kedua Angkatan Bersenjata.

### 3. *Cooperation in situations in areas surrounding Japan.*

Dibedakan antara 2 hal yaitu pada saat situasi disekitar Jepang sedang dalam antisipasi, dan respons terhadap situasi yang terjadi atau berkembang. Pada situasi pertama, kedua pemerintah akan mengintensifkan pertukaran informasi dan intelijen dan konsultasi politik termasuk untuk mencari kesamaan assessment terhadap situasi. Pada saat yang bersamaan upaya-upaya diplomatik juga dilakukan untuk mencegah situasi berkembang memburuk. Jika situasi semakin memburuk, upaya-upaya pengumpulan intelijen dan surveilen akan lebih ditingkatkan termasuk kesiapan untuk memberikan respons. Dalam situasi diatas, Jepang akan memberikan tambahan-tambahan fasilitas termasuk “rear area support” kepada pasukan AS yang diperlukan untuk kelancaran operasi-operasi militer. Termasuk dalam hal ini adalah pangkalan-pangkalan udara Jepang maupun bandara dan pelabuhan-pelabuhan sipil di Jepang. fasilitas-fasilitas swasta.

Mengenai pengertian “*rear area support*” dijelaskan bahwa dalam rangka menunjang operasi-operasi yang dilancarkan AS, Jepang akan memberikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Jepang baik yang berada atau terletak diwilayah territorial Jepang, maupun di laut lepas dan wilayah udara sekitar Jepang, yang dilihat dari area dimana operasi-operasi kombat sedang dilakukan. Dalam memberikan rear area support ini, Jepang akan menyediakan semua fasilitas yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah Jepang termasuk fasilitas-fasilitas swasta.

Guidelines 1997 ini merupakan revisi terhadap Guidelines 1978 yang merupakan penjabaran dari AS-Jepang Security Treaty yang ditandatangani tahun 1951. Dibanding Guidelines 1978, yang baru adalah yang menyangkut klausul ketiga yaitu “*Cooperation in situations in areas surrounding Japan*” Klausul ini sangat dicurigai China sebagai upaya AS dan Jepang untuk ikut campur dalam masalah Taiwan. Dan secara keseluruhan

China menganggap kesepakatan baru AS-Jepang sebagai upaya “containment” terhadap China.

Kecurigaan China cukup beralasan karena disamping Sekretaris Kabinet Jepang belum lama ini menyatakan bahwa masalah Taiwan termasuk dalam kategori wilayah sekitar Jepang, di dalam Guidelines 1997 secara eksplisit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*areas surrounding Japan is not geographic but situational*”. Ini mengandung arti bahwa perjanjian AS-Jepang ini valid bagi setiap situasi yang muncul disekitar Jepang yang mengancam Jepang. Disamping itu, dicapainya kesepakatan antara Clinton dan Hashimoto untuk me-review Guidelines 1987 ini pada April 1996 adalah pada saat situasi di selat Taiwan sedang tegang sehubungan dengan memuncaknya maneuver militer China terhadap Taiwan berkaitan dengan rencana Pemilu Presiden Taiwan yang dikhawatirkan akan diikuti dengan diproklamasikannya kemerdekaan Taiwan.

Terlepas dari motivasi maupun reaksi atas klausul baru diatas, pembaharuan kerjasama keamanan AS-Jepang ini merupakan langkah strategis baik bagi AS maupun Jepang dalam mengantisipasi perkembangan kawasan setelah berakhirnya perang dingin dan terjadinya perubahan peta politik yang signifikan di kawasan ini. AS dalam rangka mempertahankan komitmen dan kepentingannya di Aspas memerlukan tetap terpeliharanya kerjasama dengan Jepang. Sebaliknya juga jepang memerlukan AS selama upaya untuk mengembangkan angkatan bersenjatanya tetap harus dibatasi Konstitusi. Disamping itu Jepang juga tidak dapat mengesampingkan kecenderungan pengembangan militer China yang terus meningkat, sehingga tidak mengherankan hal ini dinyatakan secara tegas dalam Defence White Paper Jepang tahun 1997.

Terlepas dari Pro dan kontra atas motivasi perluasan kerjasama pertahanan AS-Jepang, namun satu hal yang jelas bahwa tetap dipertahankannya Treaty Pertahanan AS-Jepang tersebut dinilai mampu untuk memelihara stabilitas dan keamanan kawasan. Dipertahankannya komitmen AS di Asia Pasifik sedikit banyak dapat menekan ambisi-ambisi hegemoni China dan dilain pihak juga mampu menekan Jepang untuk tidak mengembangkan kekuatan militernya.

## KORSEL

Kerjasama Pertahanan AS dengan Korea Selatan dimulai sejak tahun 1953. melalui *Mutual Security Agreement* tersebut disepakati kerjasama untuk saling membela satu sama lain bila terjadi serangan dari luar (agresi). Berdasarkan Perjanjian tersebut AS mempunyai hak mendirikan pangkalan militer, dan hingga sekarang ini jumlah personil militer AS di Korea Selatan adalah 25.000 orang. Berdasarkan perjanjian tersebut Korea Selatan ikut membantu menyumbang tentaranya untuk bergabung dalam perang Vietnam dan Irak.

Namun demikian terdapat beberapa perbedaan dalam memandang isu-isu regional dewasa ini antara Pemerintah AS dan Korea Selatan, terutama dalam menangani masalah Korea Utara. Dalam menyikapi Isu Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan lebih menyukai “*sunshine*” dan “*peace*” dan “*prosperity*” daripada kebijakan menekankan pertempuran dengan Korea Utara. Sementara Pemerintah AS (Presiden Bush) lebih menyukai pandangan garis keras *hardline* dalam mendekati to Pyongyang. Generasi muda Korea Selatan tidak mempunyai persepsi tentang ancaman Korea Utara dan akibatnya lebih banyak mempertanyakan relevansi keberadaan militer Amerika di Korea Selatan.

Persepsi yang berbeda terjadi dengan keberadaan Jepang. Kebencian terhadap Jepang tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi AS di mana hubungan AS-Jepang sedang dalam hubungan yang dekat. Ketegangan Korea Selatan - Jepang terjadi karena ketegangan sejarah dan perselisihan territorial di batas laut kedua belah pihak. Akibat perselisihan tersebut pada 1998 militer Korea Selatan telah melakukan tes peluncuran rudal kedekat wilayah Jepang, sehingga menimbulkan protes dari pihak Jepang serta menjadikan ketegangan dengan angkatan perang Amerika yang berpangkalan di Korea Selatan. Korea Selatan juga menolak menjadi bagian dari latihan PSI, yang didesain untuk mencegah berkembang-biakan senjata pemusnah missal Korea Utara.

Dalam hal “ancaman China”, Korea Selatan berpendapat bahwa pertumbuhan China bukanlah ancaman, namun sebagai salah satu kekuatan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan di kawasan.

Pemerintah Korea Selatan juga mulai mempertanyakan struktur komando kombinasi pasukan AS dan Korea Selatan, dibawah seorang Jenderal AS. Disebutkan bahwa prioritas penggelaran pasukan AS sekarang lebih banyak di Timur Tengah, oleh karena itu AS ingin mengurangi militernya di AS di Asia Timur untuk diberikan penguatan di Asia Tengah. Rencana sekarang AS akan mengurangi angkatan perang AS di Korea Selatan dari 30.000 sampai 25.000 pada tahun 2008. Persoalan-persoalan lain yang timbul terhadap aliansi AS-Korsel mengenai masa tugas pasukan aliansi, masalah jumlah ukuran pasukan AS di Korea Selatan. Di bawah Masa Depan proses aliansi, Amerika Serikat dan Korea Selatan setuju atas menempatkan dasar, termasuk kepulauan Yongsan Garrison kepada wilayah Korea Selatan. Melakukan restrukturisasi, modernisasi dan rasionalisasi keberadaan pasukan bentuk mekanisme konsultatif untuk menanggapi persoalan keamanan baru.

AS dan Korea Selatan berusaha untuk mengembangkan “*strategic flexibility*,” dengan menempatkan kembali dan mengubah struktur angkatan perangnya di Korea Selatan. Konsep memerlukan ciptaan lebih kesatuan-kesatuan aktif yang bisa disebarkan sampai situasi darurat kemanapun terjadi. Kebijakan ini kelihatannya bertentangan dengan posisi Korea Selatan bahwa mereka mempunyai hak ke veto penggelaran pasukan ke negara ketiga.

Taiwan

Sejak akhir perang Korea, AS terus merasa berkepentingan akan masa depan Taiwan yang damai. Untuk tujuan itu, AS telah memberikan sejumlah besar bantuan ekonomi di tahun 60-an dan 70-an dan membentuk aliansi militer di tahun 1955 serta mensuplai Taiwan dengan sejumlah besar peralatan militer.

Normalisasi hubungan AS-China di tahun 1979 dimungkinkan dengan munculnya dua pemimpin baru di China dan AS yakni Deng Xiaoping dan Presiden Carter yang sama-sama memiliki fleksibilitas dan komitmen untuk memperluas dan memajukan hubungan AS - China. Untuk itu mereka bersedia berkompromi dalam persoalan Taiwan. AS pada saat itu bersedia untuk mengkaji ulang bahkan membatalkan bahkan membatalkan beberapa kebijakan sebelumnya demi memenuhi persyaratan yang diajukan China bagi kondisi normalisasi hubungan AS-China. Termasuk diantaranya menunda hubungannya dengan Taiwan, memindahkan pasukan AS dari kepulauan ini, dan mengakhiri *Mutual Defence Treaty* yang mengikat hubungan AS – Taiwan sejak akhir perang Korea. China sebaliknya juga melakukan upaya Deng yang telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politiknya bisa memberi toleransi bagi berlangsungnya hubungan tidak resmi AS – Taiwan termasuk dalam hal penjualan senjata.

Menghadapi situasi baru setelah normalisasi, Kongres AS yang merasa khawatir akan masa depan keamanan Taiwan menginginkan jaminan bahwa hubungan yang ada tetap bisa dipertahankan, walaupun tanpa pengakuan diplomatic. Untuk itu diciptakanlah *Taiwan Relation Act* (TRA) yang isinya kurang lebih jaminan bagi hubungan perdagangan, pertukaran antar masyarakat, dan bahkan kelanjutan bagi transfer senjata dan teknologi dari AS kepada Taiwan. Selain itu, AS juga sangat berkepentingan bahwa masa depan reunifikasi China-Taiwan secara damai, dan jika hal itu tidak dilakukan dengan cara-cara damai, maka AS merasa berkepentingan untuk terlibat.

Periode di antara 1979 sampai dengan 1983-1984 memperlihatkan bahwa walaupun AS terus punya hubungan keamanan dengan Taiwan, hubungan dengan China tetap berlangsung mulus. Masalah Taiwan saat itu memang dikesampingkan oleh China mengingat hubungan ekonomi yang ekstensif dengan AS dan negara-negara Barat lebih mendesak dilakukan untuk kepentingan modernisasi ekonomi yang dijalkannya.

Periode sesudah itu masalah Taiwan kembali muncul di permukaan. Pada periode pertengahan 1980-an memang arti strategis China untuk AS sudah berkurang. Kebijakan AS pada masa pemerintahan pertama Reagan yang bersikap lebih suportif kepada

Taiwan, memancing kemarahan China. Begitu juga periode akhir kepemimpinan Presiden Bush dengan penjualan 150 pesawat F-16.

Pada masa Clinton, pada awalnya Clinton sangat suportif terhadap Taiwan. Namun terjadi pergeseran pandangan dalam melihat peran China. Dengan kebijakan “*comprehensive engagement*” Clinton tidak ingin mengisolasi China, tetapi mengikutsertakan China dalam setiap isu global. Sayangnya, dalam pelaksanaannya kebijakan ini tidak koheren dan tidak terintegrasi dalam satu paket yang menyeluruh.

Yang terjadi kemudian lebih banyak ketidakjelasan dan friksi dalam bermacam-macam persoalan yang menyangkut hubungan AS-China seperti perdagangan, HAM, piracy, penjualan senjata, Taiwan dan sebagainya. Hal-hal tersebut menimbulkan kritik yang tajam dari anggota kongres yang saat ini lebih aktif turut serta mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri. Di tengah ketidakpuasan terhadap cara Clinton menangani kebijakan terhadap China, Kongres AS banyak mencampuri dengan menekan eksekutif dengan bermacam-macam RUU. Dalam campur tangannya, masalah Taiwan mendapat perhatian yang khusus dari anggota Kongres. Seringkali campur tangan ini tidak bisa diatasi oleh presiden, mengingat banyaknya kepentingan dan pertimbangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini.